

EVALUASI KEBIJAKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM PENANGGULANGAN BERITA HOAKS DI RANAH POLITIK SIBER TAHUN 2021

**(STUDI KASUS: PERATURAN BSSN NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI
KEAMANAN SIBER)**

Nebula Fauzan Hasani

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk melihat evaluasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan BSSN di dalam pelaksanaan dan penanggulangan mereka terkait dengan berita hoaks di ranah siber, terutama di ranah politik siber dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori formulasi kebijakan, teori implementasi, teori evaluasi kebijakan, teori elit, dan teori pemetaan *stakeholder*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus dengan metode campuran (*mixed method*). Metode campuran yang dimaksud adalah penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengkaji studi kasus yang diteliti. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian studi kasus terkait dengan objek BSSN. Sumber data yang diperoleh berbentuk data primer dan data sekunder. Teknik sampling yang dilakukan adalah purposive sampling. Penulis menggunakan teknik Systematic Literature Review, metode observasi unobstrusive, survei deskriptif, dan analisis SWOT.

Hasil penelitian ini adalah bahwa institusi BSSN secara spesifik bukan bertujuan atau ranah yang membahas terkait dengan penanggulangan hoaks melainkan untuk bertujuan sebagai institusi yang menjaga keamanan ruang siber di Indonesia meskipun mereka sebagai lembaga pemerintah tetap terlibat dalam penanggulangan hoaks. BSSN berharap mengenai kebijakan mereka terkait dengan penanggulangan hoaks agar lebih masif lagi dilakukan agar secara maksimal dapat mereduksi hoaks yang tersebar sebagaimana BSSN juga berperan untuk menjaga ruang siber agar bersih dari hoaks. BSSN telah melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya terkait dengan penanggulangan hoaks seperti membangun pola koordinasi (misal: program bersama) antar kementerian sebagai pemangku kepentingan. Meskipun tidak membangun sumber daya dan infrastruktur secara spesifik untuk penanggulangan hoaks, BSSN tetap melakukan penanggulangan hoaks seperti literasi media kepada masyarakat dan melakukan klarifikasi berita hoaks yang menghantam langsung BSSN. Ditemukan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh BSSN tidak memiliki kepentingan politik. Berdasarkan respon masyarakat terkait kebijakan BSSN, ditemukan angka IFAS sebesar 2,97 dan angka EFAS sebesar 3,28 secara berurutan.

Keywords: Institusi, Penanggulangan, Pemerintah, Membangun Pola Koordinasi, Mereduksi, Hoaks, Literasi Media, Klarifikasi, Kepentingan Politik

POLICY EVALUATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY IN PREVENTION OF HOAX NEWS IN THE CYBERPOLITICS SPACE IN 2021 (Case Study:

BSSN Regulation No 3 of 2021 About the Implementation of Media Literacy and Cybersecurity Literacy)

Nebula Fauzan Hasani

ABSTRACT

This study aims to examine the policy evaluation of BSSN policies regarding their implementation and countermeasures to hoax news in the cyberspace, especially in the area of cyber politics by using public policy theory, policy formulation theory, implementation, evaluation theory, elite theory, and stakeholder mapping theory.

This research uses a case study research approach with mixed methods. The mixed method in question is the use of qualitative and quantitative methods in reviewing the case studies studied. The method used in this study is a case study research approach associated with the BSSN as an object. The study obtained primary and secondary data. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The author used systematic literature review technique, unobtrusive observation method, Normative Survey Method, and SWOT analysis.

The result shows that despite BSSN specifically does not aim or is involved in the domain related to hoax countermeasures, as a governmental institution that maintains the security of cyberspace in Indonesia, it is still involved in hoax countermeasures. BSSN hopes that their policies related to mitigating hoaxes will be more massively implemented in order to effectively reduce the spread of hoaxes as BSSN also plays a role in keeping cyberspace free from hoaxes. BSSN has cooperated with other institutions related to hoax countermeasures such as building coordination patterns (i.e., common programs) between ministries as stakeholders. Although BSSN does not specifically build resources and infrastructure for hoax countermeasures, it still conducts hoax countermeasures such as media literacy to the public and clarifying hoax news that hit BSSN directly. It was found that the policies implemented by BSSN have no political interests. Based on the community's response to the BSSN policy, an IFAS score of 2.97 and an EFAS score of 3.28 were found respectively.

Keywords: Institution, Countermeasures, Government, Building Coordination Patterns, Reducing, Hoaxes, Media Literacy, Clarification, Political Interest